

LINGKAR OLIGARKI PARTAI GOLKAR DI RIAU
TAHUN 2003-2013

MAYA WULAN SARI
DAN
DR.HASANUDDIN.M , SI

Universitas Riau, kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293
Cp : 082391629823

*Abstract : **Ring oligarchy RIAU year 2003-2013 Golkar Party.** The research looked at how the existing oligarchy circumference at the Golkar party Riau , Riau where the government both at the executive and legislative branches in which there is a cadre of the Golkar party has always dominated the regional government of Riau . During Rusli Zainal served as governor of Riau in 2 periods , ie 1 of the 2003-2008 period , and a 2 -year period 2008-2013. Oligarchy is when being in front and behind the power that always overshadows the power of government . The person who plays this oligarchy is no friend of the environment , family , and even alumni. This description can also be referred to as a three-legged oligarchy , where the influence of the three will not be able to escape from the shadow of power , particularly the power of the local government of Riau . Political party , Golkar party is more specifically known as a party built on the new order , the journey and his work will always be overshadowed by three feet oligarchy .*

This study aims to look at how the role played by travel oligarch and his people in control of government for the benefit of his people . This study used a qualitative approach in describing each phenomenon and analyzes encountered . This study uses as a resource person as an object informen information on this research . The use of informants as informen aims to strengthen the analysis will be concluded in answering the theory used . Data used in this study is primary data and secondary data obtained through the collection of data from a variety of media and direct interviews with sources of research . Analysis of the data in this study used a descriptive technique that aims to explain and describe the findings in the field .

Based on the research that there is a three-legged oligarchy in Riau administration both in the executive and legislative branches , where they shared background of the Golkar party , during the second period of oligarchic leadership Rusli Zainal seen mainly in strategic positions held by his people . Strategic positions that would have paved the way oligarchs to achieve the goals they want , with the peak magnitude of the problem was the elucidation of PON fund corruption case related to the manufacture of regulations in cooperation with the department of youth and sports and the DPRD Riau province with the approval of the governor .

Keywords : Oligarchy = Friend , Family , Alumni

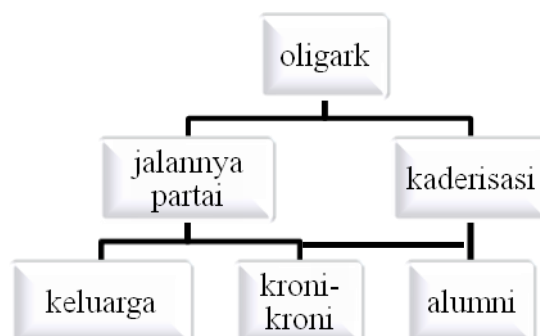
LATAR BELAKANG

Oligarki merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh sejumlah kecil elit tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan melalui pembentukan kebijakan publik terutama untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya secara finansial. sistem ini mengesampingkan kepentingan yang lebih luas misalnya kepentingan rakyat. Sedangkan oligarki politik senantiasa akan menghasilkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Karena sistem ini hanya merupakan pengingkaran dari sebuah sistem yang diharapkan diisi orang-orang bijak yang bertujuan pada kepentingan rakyat menjadi sebuah permainan beberapa orang saja, serta tidak lagi memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat.

Berbicara oligarki berarti berbicara tentang siapa, bagaimana dan apa dampak yang akan di akibatkan kecendrungan oligarki, oligarki sangat kuat keberadaanya di indonesia, bahkan di Riau, hal ini dikarenakan oligarki merupakan warisan dari masa orde baru, sebagaimana oligarki sangat cepat merasuk keberbagai aspek sistem politik, yang paling mendominasi para oligarki disini adalah partai politik, dimana penentuan segala kekuasaan ada pada partai politik, yang merupakan aspek terpenting dalam mekanisme kehidupan politik. Berbicara tentang kehidupan politik berarti berbicara mengenai kecendrungan oligarki yang mempengaruhi kehidupan politik bahkan bisa saja mempengaruhi sistem politik, hal ini karena implikasi dari oligarkis terhadap kehidupan politik sehingga dapat memperlihatkan siapa yang tergolong kedalam oligark.

Pengaruh oligarki dalam partai politik dapat melibatkan beberapa orang-orang yang ada disekitar partai, maupun orang-orang yang berkuasa yaitu mencakup 3 hal, yaitu kekeluargaan, alumni, dan kroni-kroni dari partai politik tersebut yang hanya mementingkan sekelompok elit kecil saja, dengan cara mengambil keputusan partainya untuk kepentingan kelompok elit kecil itu dengan mengesampingkan hakikat mereka sebagai jembatan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang, dan ini di lakukan untuk mendapatkan keuntungan . besarnya pengaruh oligarki ini dapat menggeser hakikat partaipolitik terutama partai golkar yang ada di Riau, hal ini dapat dilihat sejak ditentukanya calon-calon pemimpin dari partai golkar sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kecenderungan oligarki sangat kuat keberadaanya di Riau hal ini karena penyanggahnya sendiri sangat kuat, kecenderungan yang dapat menjadi oligarki yaitu ialah partai-partai politik besar yang ada di Riau .

Perjalanan oligarki dalam mempengaruhi suatu kekuasaan dapat dilihat dari bagan dibawah ini :



Sumber: Olahan dari berbagai sumber

Definisi oligarki bertentangan dengan demokrasi yang secara jelas di anut oleh pemerintah Riau di mana kekuasaan berada di tangan banyak orang. Konsep ini sering terlihat dalam kenyataan khususnya pada pemerintahan Riau pada masa reformasi ini di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh minoritas kecil. Dalam buku (Oligarchy, Jeffrey A. Winters) membuat kerangka dalam mendefinisikan oligarki. Pertama, mengenai dasar dari kekuasaan minoritas oligarkis bahwa oligarki berbeda dari dominasi minoritas lainnya karena dasar kekuasaan oligark sukar sekali untuk dipecah dan tidak hanya itu, kekayaan pribadi yang sangat besar menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan politik. Pandangan Winters ini dapat kita contohkan dengan kiprah partai politik dalam kekuasaannya merekrut kader-kadernya, dalam hal ini partai memiliki Kekuasaan yang mendominasi minoritas kadernya, karena hal ini yang menyebabkan munculnya kader-kader baru yang masih diragukan pengalam dan kualitasnya dalam berpolitik sehingga hal ini dapat mengakibatkan ketidak seimbangan seperti yang di jelaskan winters.

Selanjutnya mengenai kecendrungan oligarki yang ada dalam tubuh partai golkar Riau dapat dilihat dari berbagai macam kasus atau masalah-masalah yang timbul baik intren maupun ekstren yang ada dalam tubuh partai golkar Riau, katakan saja masalah mengenai konsistensi pengkaderan yang tidak dapat diimbangi dengan pemosisian yang baik, sebagaimana sering terjadinya pengabaian terhadap kader lama yang dapat dikatakan berkualitas, akan tersingkir kesempatanya dengan datangnya kader baru yang dapat melesat naik mendapatkan posisi penting dalam kepengurusan partai, hal ini tentu saja melibatkan para oligark yang berhasil mempengaruhi petinggi partai untuk menempatkan orang-orangnya diposisi yang startegis, hal ini tentu untuk kepentingan dan keuntungan kaum oligarki.

Selanjutnya Implikasi dari perilaku oligarki bagi partai golkar yang mempengaruhi rekrutmen politik dalam demokratisasi partai terlihat secara Idealnya pengurus harus berasal dari kader yang sudah dibina dari bawah namun dalam realitanya terkadang partai ingin mendapatkan SDM (sumber daya manusia) yang lebih baik, biasanya mereka (Oligark) mengundang pihak luar yang dianggap lebih potensial. Sementara itu, ketika kita lihat dan amati terkait banyaknya kader yang potensial dalam partai golkar Riau yang tidak dipakai, melihat hal ini dapat dikatakan bahwa oligark partai golkar terdapat dalam internal partai.

Oligarki yang terkenal dalam catur politik, terutama partai politik yang ada di daerah Riau, khususnya partai golkar dikenal bahwa oligarki adalah sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh tangan minoritas kecil. Minoritas di sini adalah orang-orang yang memiliki klekuasaan politik dalam menentukan arah perjalanan partai politiknya, karena dalam hal ini berbicara mengenai pengaruh konsep oligarki dalam kiprah partai golkar di Riau yang sangat terlihat jelas pada proses rekrutmen politiknya atau rekrutmen para kadernya yang lebih mengutamakan nepotisme, atau sistem kekeluargaan sehingga mengesampingkan potensi-potinsi lama yang ada pada kader-kader lamanya, hal ini sangat terlihat jelas pada contoh di atas, implementasi ini sama halnya jika kita merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu oligarkhia (oligarki) terdiri atas oligoi (sedikit) dan arkhein (memerintah). Bertitik tolak dari permasalahan ini lah, yang mendasari Saya memilih judul “ **LINGKAR OLIGARKI PARTAI GOLKAR DI RIAU TAHUN 2003-2013** ”.

PERUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah lingkaran oligarki dalam tubuh partai Golkar di Riau?
2. Bagaimanakah implikasi oligarki dalam Partai Golkar di Riau pada eksekutif maupun legislatif ?

TUJUAN PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lingkaran oligarki dan partai Golkar yang ada di Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja Implikasi oligarki baik dalam eksekutif maupun legislatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk mengemukakan teori yang dianggap relevan untuk menjawab secara tertulis terhadap tujuan yang ingin di berikan .

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, serta ketimpangan dalam kekuasaan sehingga kecenderungan oligarki bisa sangat terlihat dalam suatu kekuasaan itu sendiri. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

Pengertian Pembagian Kekuasaan , Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 140).

Berbeda dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang

bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

konsep oligarki itu sendiri adalah oligarki merupakan, "*the politics of wealth defense by materially endowed actors.*". Sedangkan, kaum *oligarch* diartikan sebagai, "*Actors who command and control massive concentration of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth and exclusive social position*" yang artinya "*politik sebagian dari pertahanan kekayaan material yang diberikan oleh aktor/pemain*" sedangkan, kaum oligarki di artikan sebagai "*aktor memberi perintah dan control yang akan dapat meningkatkan kekuasaan pribadi dan posisi sosial yang tinggi*". Konsep ini dapat membuktikan bahwa oligarki akan senantiasa mempengaruhi kehidupan politik yang melibatkan aktornya untuk bergerak mencari bahkan mempertahankan kekayaan untuk kaumnya serta posisi yang aman bagi para oligark di dalam pemerintahan.

LINGKAR OLIGARKI PARTAI GOLKAR DI RIAU TAHUN 2003-2013

PARTAI GOLKAR DI RIAU

Partai politik memegang peranan yang sangat penting, ini dikarenakan partai politik menjadi satu-satunya kendaraan politik bagi para calon atau aktor politik yang ingin maju dalam suatu pemilu meskipun dalam pemilu juga terkadang ada aktor yang memilih jalur independent namun kecenderungan para aktor untuk menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik lebih sering menjadi pilihan ketimbang jalur independent yang dinilai tidak berdampak maksimal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Perebutan kedudukan ini yang menjadikan partai politik terutama partai golkar yang kita kenal juga sebagai partai yang berkoalisi dengan partai lain untuk menjalankan tujuan yang telah mereka tetapkan, Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, menfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.

LINGKAR KEPEMIMPINAN KADER GOLKAR DALAM PEMERINTAHAN

Partai Golkar dalam pemerintahan yang dewasa ini dikenal sebagai partai ahli waris masa orde baru, partai Golkar dapat dikatakan mendapat getah akibat ulah golongan karya (Golkar) di masa lalu yang ketika memegang kekuasaan yang oligarki, tiranik, dan despotik. Golkar secara sistematis mengebiri hak-hak politik masyarakat. Akhirnya public kehilangan masa depan politiknya dan tersangkut dalam jaringan krisis oligarki yang meradang dan sulit dibebaskan dalam waktu singkat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagai sebuah kekuatan politik, Golkar tidak saja tampil bahwa sebagai pembaharu politik sebagaimana ketika Golkar dilahirkan pada tahun 1964. Akan tetapi juga larut dalam permainan kekuasaan orde baru. Golkar dijadikan sebagai alat politik semata untuk memberikan legitimasi kepada struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh para oligarki oleh karena itulah Golkar lebih tampil sebagai “the electoral machine ketimbang sebuah partai yang berkuasa (the ruling party) yang dapat melakukan kontrol terhadap jalanya pemerintahan.

Kepemimpinan kader dari partai Golkar yang telah duduk di pemerintahan Riau, dapat dilihat dari kedudukan kader Golkar yang mayoritas berada di eksekutif maupun legislatif, hal ini dikarenakan pengaruh pemimpin dalam ruang lingkup kepemimpinan Ruzli Zainal yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Riau selama 2 periode, yaitu 2003-2013, sebagaimana diketahui bahwa Ruzli Zainal pada masa itu adalah ketua DPD partai Golkar, oleh karena itulah Ruzli Zainal memberikan kesempatan yang besar pada partai Golkar untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan Riau, pada masa pemerintahan Ruzli Zainal ini oligarki sangat terlihat, dengan banyaknya kader Golkar yang masuk ke DPRD, dan bahkan DPR di tingkat provinsi.

Oligarki yang terlihat adalah dengan keberadaan “kutu loncat” dimana keberadaan 'kutu loncat' dari partai politik (Parpol) lain mewabah di DPD I partai Golkar Riau seperti, Nasir Day (dari Partai Patriot), Edy Ahmad RM (Partai PDK) dan Erwandy Saleh (PKS) yang sudah malang melintang sebagai kader Golkar sejak tahun 1977 bahwa, untuk menjadi pengurus DPD partai Golkar Riau standarnya minimal 5 tahun. Akan tetapi berbeda dengan 'kutu loncat' yang secara tiba-tiba seperti permainan sulap menjadi pengurus DPD partai Golkar dengan menetapkan standar baku partai Golkar. Para kutu loncat tersebut juga perlu dipertanyakan nomor pokok anggota Golkar (NPAG). Partai Golkar menjadi titik konsolidasi dalam menghadapi agenda politik pada masa mendatang. Konsolidasi sebaiknya dengan mengedepankan loyalitas kader dengan melewati jenjang pengkaderan di partai Golkar, namun karena kuatnya pengaruh oligarki mengakibatkan kader “Kutu Loncat” semakin mewabah dalam tubuh partai Golkar Riau. Hal ini dikarenakan partai Golkar merupakan partai kader.

Keberadaan partai Golkar dalam pentas politik di pemerintahan baik ditingkat nasional maupun daerah Riau yang dikembangkan melalui stigmatisasi bahwa oligarki yang ada dalam partai Golkar merupakan partai masa lalu yang pendosa. Oleh karena itu, keberadaan oligarki partai Golkar menjadi suatu yang menarik untuk dicermati dan diamati. dapat dikatakan bahwa partai Golkar nyaris berada diluar kekuasaan dan bergelut dengan oligarki yang keberadaanya sangat terlihat, terutama dalam pemerintahan di provinsi Riau.

Harapan terbesar rakyat adalah benar-benar di jalankannya demokrasi yang sepenuhnya dari rakyat, bukan demokrasi yang berasal dari para oligark, terutama bagi masyarakat Riau yang berharap partai-partai politik besar seperti golkar yang merupakan partai warisan orde lama yang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi rakyat namun pada realitanya partai golkar yang mayoritas para kadernya menduduki eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan Riau, karena dilatar belakangi orang no 1 Riau sejak tahun 2003 – 2013 adalah kader yang di militan dari partai golkar yaitu Ruzli Zainal yang kita ketahui pada saat sekarang ini telah tersangkut kasus korupsi, dimana beliau telah mengorganisir para oligark yang bermain di pemerintahan dan di belakang pemerintahan untuk mengendalikan pemerintahan Riau. Dari gambaran ini lah akan dikaji lebih mendalam pada sub bab selanjutnya bagaimana perjalanan para oligark partai golkar Riau baik yang ada di eksekutif, dan legislatif.

PENGARUH OLIGARKI PARTAI GOLKAR DALAM PEMERINTAHAN RIAU

Kronisme dan nepotisme masih menjadi isu sentral politik era reformasi. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan para petinggi partai dalam menempatkan keluarganya pada posisi strategis dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2009. Fenomena politik keluarga ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah (caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Fenomena politik keluarga ini setidaknya disebabkan empat hal. Pertama, imbas dari sistem pemilu dan persaingan yang kian liberal. Karena itu, nama besar dan ketokohan sejumlah keluarga petinggi parpol diyakini dapat menjadi modal meraup suara. Kedua, potret kegagalan parpol dalam mengikat konstituennya. Karena itu, elite parpol cenderung mencari siasat untuk menarik konstituennya dengan menempatkan caleg yang layak jual. Cara instan yang digunakan adalah melirik figur terkenal dari kalangan keluarga elite partai. Ketiga, lemahnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal parpol, terutama mekanisme dalam penentuan caleg. Keempat, terlalu besarnya daya cengkeram kekuasaan para elite parpol, terutama elite di tingkat pusat. Dari keempat faktor itu, yang paling dominan mengembang biakan politik keluarga adalah faktor keempat, kuatnya daya cengkeram kekuasaan elite.

Maraknya politik keluarga di tubuh parpol akan mengarah pada oligarki partai politik. Pada saat itu, suatu partai dikuasai dan dikelola sebuah keluarga besar. Parpol seolah menjadi kerajaan keluarga yang dikuasai dan dikelola turun-temurun. Kondisi ini akan membahayakan proses demokrasi yang dibangun karena akan memengaruhi kelembagaan politik internal partai. Parpol pun tidak akan kunjung terlembaga sebagai organisasi modern dan demokratis. kekuasaan elite partai masih cukup kuat dalam proses menyusun daftar caleg yang merupakan bagian hulu dari rantai kebijakan dalam proses rekrutmen caleg. Untuk memutus mata rantai oligarki yang kedua ini, penyusunan daftar caleg di parpol seharusnya dipilih lewat proses internal yang transparan, bukan lagi kewenangan penuh elite partai. Karena itu, ke depan, diperlukan sistem pemilu internal yang melibatkan kader dan konstituen partai untuk memilih bakal caleg atau pejabat publik dari suatu partai.

Persekongkolan elite partai dalam suatu oligarki semu untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup untuk umum dan untuk membatasi kompetisi. Perlu dipahami di dua ranah, yakni ranah partai dan ranah pemerintahan. Pada ranah partai, selalu saja ada segelintir elite yang memegang kekuasaan semi mutlak. Mereka bisa disebut pendiri,

pimpinan, atau pemodal. Dalam bahasa Robert Michels (1876-1936), mereka disebut oligarki. Di hampir semua partai kita ada oligarki itu. Maka sebabnya suksesi di internal partai selalu sulit diprediksi dengan ukuran normal. Pilihan oligarki selalu menjadi arus utama.

Elite pada posisi macam ini tidak selalu secara langsung mengintervensi proses elektoral, tetapi eksistensi ketokohan dalam patronase politik selalu melahirkan implikasi demikian. Di ranah pemerintahan, oligarki politik umumnya dibaca dari perubahan konstelasi di tingkat elite. Maka, sesuatu yang logis kalau ada yang menduga oligarkiI pergi karena skenario kelompok tertentu di balik layar. Akan tetapi, pada hakikatnya oligarki politik memang sulit diukur.

Oligarki terukur dan terprediksi karena aktor-aktornya bisa saja berada di depan atau dibalik layar tampak dari pergerakan politiknya. Oligarki di tubuh partai cenderung terbaca, tetapi tak terukur. Oligarki di pemerintahan, apalagi dalam sistem multipartai yang kompleks, amat rumit dilacak. Sama rumitnya dengan dampak dari manuver politik mereka. Kalau itu terjadi, yang dicemaskan bukan saja kekuasaan demokratik dibajak oleh segelintir orang, melainkan adanya "pemerintah" di dalam pemerintah. Dalam arti seharusnya, secara formal presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, tetapi faktanya mereka hanya bisa memberi poin di papan catur oligarki politik. Sebab, dalam politik oligarki, arah politik ditentukan oleh tangan-tangan siluman didepan dan balik layar.

OLIGARKI PARTAI GOLKAR DI EKSEKUTIF

Oligarki yang tampak atau yang berimplikasi dari kader partai Golkar di kursi eksekutif dapat dilihat dari susunan kepemimpinan Rusli Zainal dalam urusan pemerintahan provinsi Riau sebagai terdiri dari jabatan struktural, yang dibagi kedalam :

1. Eselon I yang di dalamnya adalah sekretaris daerah , yang dipegang oleh Zaini Ismail, beliau sangat dikenal oleh orang-orang Rusli sebagai "Konco" atau mempunyai hubungan pertemanan yang sangat tekat dengan Rusli, Selain itu beliau juga merupakan orang satu kampung dengan Rusli, hal ini tentu akan memperlihatkan hubungan yang tidak biasa, selain hubungan profesional dengan atasannya.
2. Eselon II yang didalamnya adalah kadis-kadis (kepala dinas) yang dipilih oleh gubernur terkait, adapun para kepala dinas yang memiliki hubungan dengan oligark adalah Drs.H.M Wardan yang pada periode pertama merupakan dinas pendidikan provinsi Riau, beliau adalah orang sekampung Rusli, setelah Periode ke dua, Wardan naik menjadi bupati Inhil yang menjabat sampai dengan sekarang, selain beliau adalah orang sekampung , pada akhirnya beliau merupakan kader yang berasal dari 1 kapal, yaitu partai Golkar. Hubungan ini tentu akan menghasilkan hubungan fungsional yang tidak biasa dibalik kekuasaan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah Edy Satria yang duduk sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi Riau, beliau adalah teman sepermainan Rusli di kehidupan sehari-hari. Surya Maulana yang memiliki jabatan sebagai dinas perhubungan provinsi, juga dikenal sebagai orang sekampung Rusli , dan sekarang beliau duduk di sebagai ketua BKN (badan kepegawaian daerah). Said Syarifudin selaku dinas kebudayaan dan pariwisata, Said Mukri selaku dinas pertambangan dan energi merupakan orang satu kampung Rusli zainal. Herianto Selaku dinas PU juga merupakan "Konco" atau teman akrab Rusli, mereka sering melakukan hubungan-hubungan diluar pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan, hal ini tentu tidak memungkiri mereka dapat melakukan hubungan-hubungan dalam melakukan loby politik untuk memuluskan pekerjaan mereka. Dan Zulher selaku

dinas perkebunan merupakan kader partai golkar yang juga memiliki hubungan yang dekat dengan Rusli. Selanjutnya pejabat eselon II yang memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan Riau adalah Ir.Irwan duduk di dinas perikanan dan kelautan yang merupakan keluarga dari Rusli zainal. Karena beliau memanggalkan irwan sebagai makcik, seterusnya ada Joni Irwan yang duduk di dinas pendapatan daerah, beliau merupakan ipar Rusli zainal, yang merupakan keluarga dari istri rusli zainal,

3. Eselon III yaitu kepala bagian (Kabag) yang duduk membantu tugas gubernur terkait. Sedangkan kepala dinas provinsi Riau pada masa kepemimpinan Rusli Zainal yang memiliki hubungan dengan oligark adalah pada umumnya di tingkat eselon III yang di dalamnya terdapat kepala bagian yang membantu seorang kepala daerah dalam menjalankan proses pemerintahan daerah, yang di dalamnya, selain terdapat orang-orang yang duduk secara fungsional, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, akan ada beberapa yang memiliki hubungan yang intren dan nantinya akan memperlihatkan proses oligark yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, yang mana diketahui bahwa M Guntur merupakan menantu dari ketua harian partai golkar yaitu bpk Ruspam Aman.
4. Eselon IV yang di dalamnya adalah kasubag-kasubag (Kepala Sub bagian) yang bertugas membantu tugas dari kepala bagian, dan mereka tentu memiliki hubungan dengan oligark yang secara otomatis apabila para kepala dinas memiliki hubungan dengan oligark yang dalam hal ini adalah teman-teman dan keluarga serta konco-konco petinggi daerah yang bekerja sama menjalankan pemerintahan daerah.

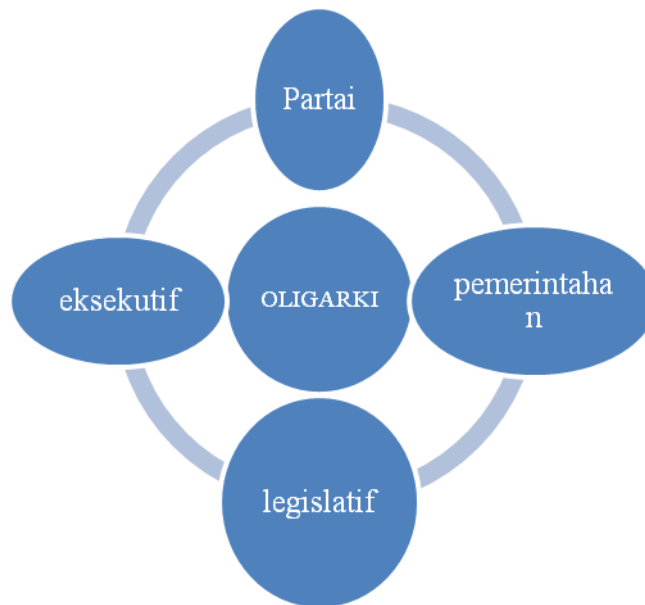
Semua eselon ini adalah semua urusan yang membantu gubernur dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan provinsi Riau. Dimana semua eselon ini adalah di tunjuk dan dipilih oleh gubernur, karena Semua eselon – eselon ini dipilih dan ditunjuk oleh gubernur terkait, secara tidak langsung tentu oligarki akan terlihat, terutama oligarki yang mementingkan keluarga dan orang sekampungnya, dimana yang telah di tetapkan bahwa semua eselon ini berasal dari PNS baik di daerah kabupaten maupun PNS Kota yang bukan berasal dari partai. Dengan adanya wewenang yang dimiliki oleh gubernur yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan orang-orang yang membantunya di pemerintahan, dengan mekanisme yang seperti ini oligark dapat bergerak dan mengambil peran untuk turut menentukan orang-orang yang nantinya akan menentukan arah jalannya pemerintahan.

OLIGARKI PARTAI GOLKAR DI LEGISLATIF

Selanjutnya adalah oligarki partai golkar yang duduk di legislatif pemerintah provinsi Riau, dimana seperti yang diketahui bahwa 15 orang dari keseluruhan jumlah anggota DPRD provinsi adalah berasal dari kader golkar, terutama ketua DPRD provinsi Riau yang juga berlatar belakang dari kader partai golkar, oligarki yang tampak atau yang berimplikasi dari kader partai golkar di kursi legislatif dimana akan mempengaruhi pembuatan kebijakan rakyat dan produk hukum serta APBD Riau dimana legislatif memiliki peranan yang sangat besar.

Dari keseluruhan anggota DPRD provinsi Riau, 15 orang ini yang mayoritasnya berlatar belakang dari partai golkar yang memegang kekuasaan atas lembaga eksekutif, dimana mereka yang memiliki wewenang dan tugas untuk membuat aturan-aturan, produk hukum, dan bahkan anggaran – anggaran daerah demi keberlangsungan pemerintahan daerah Riau,

keterkaitan mereka dengan para oligark tentu terlihat apabila mereka menghasilkan produk hukum atau aturan yang menguntungkan kaum mereka, seperti contohnya produk hukum yang dibuat untuk menambahkan anggaran penyelenggaraan PON di Riau beberapa waktu lalu, produk hukum yang dibuat antar lembaga eksekutif dan legislatif yaitu dinas pemuda dan olahraga bersama gubernur terkait dan beberapa anggota DPRD provinsi Riau. Hal ini tentu menjadi contoh nyata bagaimana hubungan oligark dalam mengendalikan pemerintahan di Riau, mereka saling bekerja sama dan melakukan loby politik dengan mendasari atas kebutuhan daerah dan rakyat, namun pada faktanya adalah untuk kepentingan kaum mereka. Lingkar oligarki partai golkar di riau, akan dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa oligarki akan selalu melingkar ke semua aspek mulai dari partai, lembaga eksekutif dan legislatif hingga ke pemerintahan, hal ini karena oligarki secara tidak disadari dan tidak terlihat akan selalu mempengaruhi apa pun yang mereka inginkan demi untuk menguatkan keberadaan kaum mereka dan untuk keuntungan para oligark .

Partai politik yang merupakan suatu wadah tempat penampung aspirasi rakyat yang selanjutnya menjadi tempat memperjuangkan kepentingan rakyat pada saat kadernya telah duduk di pemerintahan . dimana seperti yang banyak diketahui masyarakat bahwa partai golkar merupakan partai besar warisan orde baru yang acap kali memenangkan suara dalam pemilu baik pemilu eksekutif maupun legislative dengan berbagai kader –kadernya yang duduk dalam pemerintahan serta mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Lingkar oligarki partai dalam hal ini partai dijadikan sebagai sarana atau mesin untuk menjalankan keinginan mereka, terlebih jika partai tersebut mendominasi kepemimpinannya di lembaga daerah, dan negara. Seperti halnya di provinsi Riau , partai golkar sejak pemilu 1999 sampai sekarang selalu mendominasi kadernya duduk di lembaga eksekutif dan legislatif , bahkan pemegang kekuasaan tertinggi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang adalah kader partai golkar, hal ini tentu saja tidak akan luput dari pola oligarki yang membayangkan mereka , dengan mekanisme loby politik, namun dalam hal ini partai golkar tidak mendapatkan keuntungan secara materi, melainkan mendapatkan keuntungan berupa pertahanan jabatan atau kedudukan kadernya di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU

- Amal, Ichlasul . 1996 .*“Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Alfian,M Alfian.2009. *Inflasi Parpol dan Oligarki*.
- Apter, E. 1963 ,London: the free press of glencoe.
- Budiardjo, Miriam.2008.Dasar-dasar Ilmu Politik.edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia.
- Duverger, Maurice.. 1982. *“Sosiologi Politik”* Jakarta:Rajawali Pers.
- Endra,W Surya.1978.Kamus Politik.Surabaya.
- Hadiz, Vedi R dan Richard Robison .2004. *“Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets,”* London: Routledge.
- Hadiz, R Vedi. 2005.*“Kapitalisme, Kekuasaan Oligarkis, dan Negara di Indonesia”* dalam *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*.Jakarta: LP3ES.
- Ibnu, Alkatab Umar. 2009. *“Dari Beringin ke Beringin-Sejarah Kemelut, Resistensi dan Daya tahan Partai golkar”* . YogyaKarta
- Hasan R Iding. 2009. *“Dilema Sikap Partai Golkar”*. Harian Koran : Jakarta
- Kasnawi,M Tahir dan Thaha,Rasyid.2009.Kekuatan Sosial Politik Indonesia.Jakarta: Universitas terbuka.
- Laswell D. Harold dan Kaplan,Abraham.1950.”Power and Society”.new haven :Yale University press.
- Lijphart, Arend. 1995. *“Sistem pemerintah parlemen dan presidensial”*. Jakarta
- Mcbeth ,John.2002.”political Update”.dalam Geoff Forrester(ed).Post-Soeharto Indonesia:Renewal or chaos.The Netherlands:KITLV Press.
- Michels Robert. 1949. *“Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy”*. (Glencoe III: Free Press).
- ,1949. The Free Press. London: Transaction Publishers.
- Murshadi. 1999 .*“Ilmu Tata Negara; untuk slta kelas III”* Rhineka Putra bandung.
- Mustafa, Muhammad. 2006. *“ Kleptokrasi : persekongkolan birokrat”*.
- Negel ,H Jack.”the DescriptiveAnalysis of power”.
- Neumann, Sigmun.”Modern political parties “,dalam omparative politics: A Reader,Diedit oleh Harry Eckstein dan David .

Riswandha2008..”menuju tata Indonesia baru “.Jakarta:Gramedia.

Subakti, Ramlan.2010. *Memahami Ilmu Politik*, (PT. Grasindo. Jakarta,).

Winarno,Budi.2008.Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.Jakarta:Medpress.

Winters A. Jeffrey .2011. “Oligarchy”, Cambridge University Press.

DAFTAR INTERNET

<http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/oligarchy> diunduh Jumat 21 Mei 2010, pukul 13.00
<http://www.facebook.com/notes/pembaca-indoprogress/reformasinyaoligarki/446736878083>
http://www.gramediapustakautama.com/buku/kategori/6056/Politik&docid=dHkm0HKyvI-dlM&imgurl=http://www.gramediapustakautama.com/uploads/dirimg_buku/re_buku_picture_85318.jpg&w=257&h=400&ei=3eV5T8G_K4LxrQfDoMiZDQ&zoom=1.
http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/negara_masy_sipil_demokrasi.html
<http://www.jurnalparlemen.com/news/nasional/anas-parpol-jangan-ciptakan-kegaduhan-politik.html>, diunduh Kamis 20 Mei 2010, pukul 13:00
<http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/03/03/142/Ekonomi-Politik-Pasca-Reformasi> (30 Mei 2011)
<http://www.politikana.com/baca/2011/01/05/korupsi-birokrasi-dan-orde-baru.html> (19 Mei 200)
<http://www.shvoong.com/law-and-politics/politics/2096459-pengertian-oligarki/#ixzz1sxVypUqd>.

MUCHTAR EFFENDI b Blogger.com

www.haluanriau.com

[www.Jarring news.com](http://www.Jarringnews.com)

www.jurnalparlemen.com

www.wikipedia.co.id

www.wordpress.com

DAFTAR JURNAL

Artikel Burhanudin Murtadi (Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia) mengenai Hukum Besi Oligarki.

Media Indonesia, “Sekber Koalisi Sama Dengan Oligarki Politik”, Sabtu 8 Mei 2010 dan masih banyak berita yang terus muncul dalam beberapa hari terakhir ini di berbagai media massa yang membahas soal dampak setgab yang dianggap sebagai bahaya bagi demokrasi.

Suara Pembaruan, “Oligarki Baru Bernama Setgab”, Selasa 19 Mei 2010.